

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis strategi keamanan Jepang dalam merespons ancaman Korea Utara melalui kerangka teori *limited hard balancing* yang dikembangkan oleh T.V. Paul. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian tentang konsep *limited hard balancing* sebagai kategori analitis yang berada di antara *hard balancing* dan *soft balancing*, dan bagaimana konsep tersebut dapat menjelaskan perilaku strategis negara *middle power* seperti Jepang yang menghadapi ancaman asimetris dari aktor yang memiliki kapabilitas nuklir. Secara praktis, temuan dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa Jepang telah mengembangkan respons keamanan yang terstruktur dan terukur terhadap ancaman Korea Utara. Respon Jepang dalam menghadapi ancaman Korea Utara secara konsisten memenuhi karakteristik *limited hard balancing* melalui dua mekanisme utama yang diidentifikasi Paul, yaitu *limited arms buildup* dan *semi-formal alliances*.

Kawasan Asia Timur merupakan kawasan dengan lingkungan yang strategis dan kompleks. Kawasan yang dihadapi oleh negara *middle power* seperti Jepang ini penuh dengan ketidakpastian, dimana adanya rivalitas antara kekuatan besar khususnya antara Amerika Serikat dan Tiongkok, menciptakan kondisi ketidakpastian strategis yang mendorong negara-negara di kawasan untuk terus menyesuaikan kebijakan keamanannya. Di saat yang sama, warisan konflik historis, perbedaan persepsi ancaman, serta dilema keamanan yang berlapis menjadikan kerja sama regional sulit mencapai stabilitas yang berkelanjutan. Situasi ini

semakin diperumit oleh dinamika di Semenanjung Korea yang tetap berada dalam kondisi konflik laten, ditandai oleh belum adanya perjanjian damai, sejarah panjang provokasi militer, serta keberlanjutan program nuklir dan rudal Korea Utara. Dengan demikian, kawasan Asia Timur dapat dipahami sebagai lingkungan keamanan yang tidak hanya kompetitif, tetapi juga rentan terhadap eskalasi konflik yang dapat terjadi secara cepat dan tidak terduga.

Korea Utara, negara dengan kekuatan nuklir yang besar, merupakan sumber ancaman yang paling utama dan konkret bagi Jepang. Ancaman ini tidak hanya berakar pada hubungan historis dan politik yang penuh ketegangan, terutama terkait isu penculikan dan warisan kolonial, tetapi juga diperkuat oleh perkembangan kapabilitas militer dan nuklir Korea Utara yang semakin maju. Diversifikasi sistem rudal, peningkatan jangkauan, kemampuan manuver yang semakin kompleks, serta perubahan doktrin nuklir menuju kemungkinan penggunaan preemptif telah mengubah karakter ancaman dari yang semula bersifat potensial menjadi aktual dan multidimensional. Ancaman tersebut tidak hanya berdampak pada dimensi militer, tetapi juga menciptakan tekanan psikologis terhadap masyarakat sipil, mengganggu stabilitas domestik, serta memengaruhi kalkulasi strategis Jepang dalam kerangka aliansinya dengan Amerika Serikat. Selain itu, ketidakpastian perilaku rezim Korea Utara serta kemungkinan terjadinya decoupling dalam aliansi Jepang-Amerika Serikat semakin memperdalam dilema keamanan yang dihadapi Jepang.

Dalam merespon ancaman yang ditimbulkan oleh Korea Utara, Jepang yang dibatasi oleh Konstitusi Pasal 9, tidak diperbolehkan meningkatkan militernya secara ofensif. Kondisi ini mendorong Jepang untuk melakukan strategi yang lebih terstruktur dan efisien dalam menghadapi ancaman tersebut. Dalam hal ini, Jepang

memenuhi karakteristik strategi *limited hard balancing* melalui dua mekanisme utama yang diidentifikasi Paul, yaitu *limited arms buildup* dan *semi-formal alliances*.

Pada mekanisme pertama, *limited arms buildup*, Jepang meningkatkan kemampuan militernya secara signifikan, tetapi tetap dalam batas tertentu. Kenaikan anggaran pertahanan hingga target 2% PDB pada 2027 menunjukkan adanya perubahan penting dalam kebijakan pertahanan Jepang, namun masih tergolong terbatas jika dibandingkan dengan negara lain seperti Korea Selatan dan Tiongkok. Selain itu, seluruh peningkatan tersebut difokuskan pada kemampuan defensif, seperti pertahanan rudal, drone, dan sistem deteksi, bukan untuk menyerang atau melakukan ekspansi militer. Hal ini menegaskan bahwa Jepang hanya ingin memperkuat perlindungan diri, bukan membangun kekuatan ofensif.

Pada mekanisme kedua, *semi-formal alliances*, Jepang memperkuat kerja sama keamanan dengan negara lain tanpa membuat aliansi yang terlalu mengikat. Kerja sama dengan Amerika Serikat dan Korea Selatan, seperti penggunaan pangkalan militer dan pertukaran intelijen melalui GSOMIA, membantu meningkatkan kemampuan Jepang dalam mendeteksi dan merespons ancaman, khususnya dari Korea Utara. Namun, kerja sama ini tetap bersifat terbatas karena tidak menciptakan kewajiban pertahanan bersama secara otomatis seperti dalam NATO.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, secara praktis Jepang disarankan untuk terus menjaga keseimbangan antara peningkatan kapabilitas militer dan prinsip defensif yang diatur dalam Konstitusi Pasal 9. Penguatan pertahanan sebaiknya tetap

difokuskan pada kemampuan defensif, khususnya dalam menghadapi ancaman rudal dan nuklir Korea Utara. Selain itu, Jepang perlu mengoptimalkan kerja sama keamanan yang fleksibel melalui mekanisme seperti *General Security of Military Information Agreement*, tanpa mengurangi otonomi strategisnya dalam menentukan kebijakan keamanan.

Secara akademis, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian mengenai *limited hard balancing* dengan memperluas objek penelitian ke negara lain serta memasukkan variabel domestik seperti dinamika politik dan opini publik. Hal ini penting untuk memperkaya pemahaman terhadap penerapan konsep yang dikembangkan oleh T. V. Paul dalam menjelaskan strategi keamanan negara, khususnya dalam menghadapi ancaman asimetris di kawasan yang kompleks seperti Asia Timur.

